

Abstrak

Dalam rangka meningkatkan efisiensi perencanaan anggaran oleh KL, standar biaya masukan digunakan sebagai acuan biaya satuan berupa harga satuan, tarif dan indeks untuk pembuatan biaya komponen keluaran pada saat pembuatan RKA- KL untuk tahun anggaran berjalan. Sebagai salah satu perangkat instrumen dari penganggaran berbasis kinerja, standar biaya masukan menjadi sangat penting untuk mendukung kualitas satker RKA-KL dalam menghitung kebutuhan anggarannya dan merupakan alat reviu angka dasar yang digunakan untuk menghitung tingkat kegiatan alokasi kebutuhan belanja, output, sub-output, komponen, dan sub-komponen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan permasalahan yang dialami oleh satker KPPN Jakarta II dalam penerapan SBM sesuai dengan peraturan. Dalam rangka untuk mendapatkan data yang akurat pada penelitian, dilakukan wawancara terkait dengan penerapan Standar Biaya masukan dan studi Pustaka untuk mendukung pengolahan data RKA-KL pada Kertas Kerja. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan SBM TA 2022 dalam penyusunan RKA-KL di KPPN Jakarta II sudah sesuai dengan, namun terlihat dari rincian kertas kerja RKA-KL, bahwa ada beberapa ketidaksesuaian penyusunan RKA-KL dengan ketentuan yang ada di SBM tahun anggaran 2022 namun tidak berpengaruh karena dilakukan penyesuaian.

Kata kunci : SBM, RKA-KL, APBN, Belanja

Abstract

In order to improve the efficiency of budget planning by KL, standard input costs are used as a reference for unit costs in the form of unit prices, rates and indexes for the manufacture of output component costs at the time of making the RKA-KL for the current fiscal year. Performance-based budgeting, input cost standards are very important to support the quality of the RKA-KL satker in calculating its budget needs and is a basic number review tool used to calculate the level of activity allocation of expenditure needs, outputs, sub-outputs, components , and sub-components. This study aims to find out how the application of Standard Input Fees and the problems experienced by the Jakarta II KPPN work unit in implementing SBM in accordance with regulations. In order to obtain accurate data in the research, interviews were conducted related to the application of the SBM and a library study to support the processing of the RKA-KL data on the Working Paper. The result of this study is that the implementation of the SBM FY 2022 in the preparation of the RKA-KL at KPPN Jakarta II is in accordance with, but it can be seen from the details of the RKA-KL working paper, that there are some discrepancies in the preparation of the RKA-KL with the provisions in the SBM for the fiscal year 2022 but no effect because adjustments are made.

Key words : SBM, RKA-KL, state budget, spending